

# PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

## LAPORAN KEUANGAN

**005.03.0400.400343**

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020



**Jl. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, Wojo, Bangunharjo, Sewon  
Bantul - DI Yogyakarta 55187  
Telp. (0274) 4396412 Fax. (0274) 4396415  
e-mail : [pt.yogya@gmail.com](mailto:pt.yogya@gmail.com)**



# **LAPORAN KEUANGAN**

## **PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA**

**Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020**

**BAGIAN ANGGARAN 005.03**

**BADAN PERADILAN UMUM**

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**Jl. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, Wojo, Bangunharjo, Sewon**  
**Telp. (0274) 4396412 Fax. (0274) 4396415**  
**Bantul - DI Yogyakarta 55187**  
**e-mail : pt.yogya@gmail.com**

# *KATA PENGANTAR*

# Kata Pengantar

---

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/ Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/ Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/ Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Tinggi Yogyakarta adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Yogyakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Yogyakarta, 15 Januari 2021  
SEKRETARIS

**Drs. MUHIDIN, M.H.**  
NIP. 19661125 199603 1 001

# *DAFTAR ISI*

# Daftar Isi

---

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Pernyataan Tanggung Jawab .....	iii
Ringkasan.....	1
I. Laporan Realisasi Anggaran.....	4
II. Neraca .....	6
III. Laporan Operasional .....	8
IV. Laporan Perubahan Ekuitas.....	10
V. Catatan atas Laporan Keuangan .....	49
A.    Penjelasan Umum.....	49
B.    Penjelasan atas Pos-Pos Realisasi Anggaran.....	60
C.    Penjelasan atas Pos-Pos Neraca .....	64
D.    Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional .....	74
E.    Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	79
F.    Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya .....	82
Daftar dan Lampiran .....	88

# *PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB*

# Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Jl. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, Wojo, Bangunharjo,

Sewon Bantul DI Yogyakarta 55187

Telp. (0274) 4396412 Fax. (0274) 4396415

E-mail: pt.yogya@gmail.com

## Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2020 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Yogyakarta, 15 Januari 2021  
SEKRETARIS

**Drs. MUHIDIN, M.H.**  
NIP. 19661125 199603 1 001

# *RINGKASAN*

# Ringkasan

---

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

## 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2020.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2020 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp3.250.001 atau mencapai 0 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Negara TA 2020 adalah sebesar Rp190.065.900 atau mencapai 99,76 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp190.525.000.

## 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2020. Nilai Aset per 31 Desember 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp52.795.792 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp52.795.792; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp0 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0 dan Rp52.795.792.

## 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit)-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp3.250.001, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp199.349.110 sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp196.099.109. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Surplus Po-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp65.600 dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp196.033.509.

#### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2020 adalah sebesar Rp54.767.065 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp196.033.509 kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp194.062.236 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2020 adalah senilai Rp52.795.792.

#### **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasioal, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2020 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

# *I. LRA PERBANDINGAN*

# I. Laporan Realisasi Anggaran

## PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2020		% thd Anggaran	TA 2019
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
<b>PENDAPATAN</b>					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	3.250.001	-	2.785.000
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>-</b>	<b>3.250.001</b>	<b>-</b>	<b>2.785.000</b>
<b>BELANJA</b>					
Belanja Pegawai	B.2	-	-	-	-
Belanja Barang	B.3	190.525.000	190.065.900	99,76	108.585.000
Belanja Modal	B.4	-	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	B.5	-	-	-	-
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>190.525.000</b>	<b>190.065.900</b>	<b>99,76</b>	<b>108.585.000</b>

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan*

## *II. NERACA PERBANDINGAN*

## II. Neraca

### PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA NERACA PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2020	2019
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	52.795.792	54.767.065
Jumlah Aset Lancar		52.795.792	54.767.065
<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah	C.14	-	-
Peralatan dan Mesin	C.15	-	-
Gedung dan Bangunan	C.16	-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.18	-	-
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	-	-
Jumlah Aset Tetap		-	-
<b>ASET LAINNYA</b>			
Aset Tidak Terwujud	C.21	-	-
Aset Lain-lain	C.22	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
<b>JUMLAH ASET</b>		52.795.792	54.767.065
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	C.26	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	-
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		-	-
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.28	52.795.792	54.767.065
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		52.795.792	54.767.065
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		52.795.792	54.767.065

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

### *III. LAPORAN OPERASIONAL*

## III. Laporan Operasional

### PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2020	2019
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	3.250.001	2.785.000
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>3.250.001</b>	<b>2.785.000</b>
<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	D.2	-	-
Beban Persediaan	D.3	45.928.010	44.361.408
Beban Barang dan Jasa	D.4	56.611.500	39.637.100
Beban Pemeliharaan	D.5	4.600	78.200
Beban Perjalanan Dinas	D.6	96.805.000	26.590.000
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>199.349.110</b>	<b>110.666.708</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>(196.099.109)</b>	<b>(107.881.708)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	D.11		
Surplus Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		146.300	48.800
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		80.700	63.700
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>65.600</b>	<b>(14.900)</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>(196.033.509)</b>	<b>(107.896.608)</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>	D.12		
Pendapatan PNPB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>		<b>(196.033.509)</b>	<b>(107.896.608)</b>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

## *IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS*

## IV. Laporan Perubahan Ekuitas

**PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	2020	2019
<b>EKUITAS AWAL</b>	E.1	54.767.065	65.757.290
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(196.033.509)	(107.896.608)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3		
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1		-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2		-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3		-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4		-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5		-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6		-
<b>JUMLAH</b>			-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	194.062.236	96.906.383
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>E.5</b>	<b>52.795.792</b>	<b>54.767.065</b>

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan*

## *V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN*

## V. Catatan atas Laporan Keuangan

### A. PENJELASAN UMUM

*Dasar Hukum  
Entitas dan  
Rencana  
Strategis*

#### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Pengadilan Tinggi Yogyakarta merupakan bagian dari peradilan umum dibawah Mahkamah Agung. Pengadilan Tinggi Yogyakarta didirikan berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1980 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Yogyakarta, maka Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang meliputi wilayah hukum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan operasionalnya. Pengadilan Tinggi Yogyakarta diresmikan oleh Menteri Kehakiman RI pada tanggal 7 Mei 1981 di Gedung Agung Yogyakarta dengan dihadiri Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Bambang Surono, SH., dan Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Suparno, BA.

Visi Pengadilan Tinggi Yogyakarta adalah Visi Mahkamah Agung adalah TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG, yang bertujuan agar Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Pengadilan Tinggi Yogyakarta adalah:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Kebijakan Pengadilan Tinggi Yogyakarta adalah mendukung program reformasi judicial/pembaharuan peradilan yang dilakukan Mahkamah Agung dapat berjalan seperti yang diharapkan. Strategi yang diterapkan sesuai dengan tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Yogyakarta, antara lain :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Dalam program ini ditentukan kebijakan yaitu:

- a. Peningkatan penyelesaian perkara.

Sasaran ini dilihat dengan indikator berupa:

- Peningkatan prosentase perkara perdata yang diselesaikan
  - Peningkatan prosentase perkara pidana yang diselesaikan
  - Peningkatan prosentase sisa perkara perdata yang diselesaikan
  - Peningkatan prosentase sisa perkara pidana yang diselesaikan
- b. Peningkatan tertib administrasi perkara
- Sasaran ini dilihat dengan indikator berupa:
- Peningkatan prosentase berkas perkara perdata yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap
  - Peningkatan prosentase berkas perkara pidana yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap
  - Peningkatan prosentase berkas perkara perdata yang yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
  - Peningkatan prosentase berkas perkara pidana yang yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
- c. Peningkatan kualitas SDM
- Sasaran ini dilihat dengan indikator berupa:
- Peningkatan prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial
  - Peningkatan prosentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial
- d. Peningkatan kualitas dalam pelaksanaan pengawasan/pembinaan
- Sasaran ini dilihat dengan indikator berupa:
- Peningkatan prosentase pengaduan yang ditindak-lanjuti
  - Peningkatan prosentase temuan yang ditindak-lanjuti
2. Program Dukungan manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
- Dalam program ini ditentukan kebijakan yaitu peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*). Sasaran ini dilihat dengan indikator berupa peningkatan prosentase proses penyelesaian perkara-perkara yang dipublikasikan

## **A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Tahun 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

#### *Basis Akuntansi*

### A.3. Basis Akuntansi

Pengadilan Tinggi Yogyakarta menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### *Dasar Pengukuran*

### A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

#### *Kebijakan Akuntansi*

### A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik

spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang diterapkan oleh Mahkamah Agung yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Yogyakarta adalah sebagai berikut:

*Pendapatan -  
LRA*

(1) Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan -  
LO*

(2) Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
  - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan -  
LRA*

(3) Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

*Pendapatan -  
LO*

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(4) Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
  - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Belanja*

(5) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Beban*

(6) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Asset*

(7) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

*Aset Lancar*

a. Aset Lancar

- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

*Asset Tetap*

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (*satu juta rupiah*);
  - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 25.000.000 (*dua puluh lima juta rupiah*);
  - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap

lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir di reklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN / BMD .

*Penyusutan  
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  1. Tanah
  2. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  3. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

*Piutang  
Jangka  
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/ dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA). Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/ TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset Lainnya*

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

### Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

#### Kewajiban

#### (8) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

##### a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

##### b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari

dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

*Ekuitas*

(9) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas .

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

URAIAN	2020	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	-	-
Pendapatan Lain-lain	-	-
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Belanja		
Belanja Pegawai	-	-
Belanja Barang	216.205.000	190.525.000
Belanja Modal	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>216.205.000</b>	<b>190.525.000</b>

*Realisasi  
Pendapatan  
Rp3.250.001*

### B.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp3.250.001 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Pendapatan Pengadilan Tinggi Yogyakarta berasal dari pendapatan lainnya.

#### Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2020		
	Anggaran	Realisasi	% Real Anggaran
Pendapatan Lainnya	-	3.250.001	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>3.250.001</b>	<b>-</b>

Realisasi Pendapatan TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 16,70 persen dibandingkan TA 2019. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya pelayanan yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI TA 2020	REALISASI TA 2019	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Lainnya	3.250.001	2.785.000	16,70
<b>Jumlah</b>	<b>3.250.001</b>	<b>2.785.000</b>	<b>16,70</b>

Realisasi  
Belanja  
Negara:  
Rp190.065.900

## B.2. Belanja

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Tinggi Yogyakarta TA 2020 adalah sebesar Rp190.065.900 atau 99,76% dari anggaran senilai Rp190.525.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2020

URAIAN	2020		
	ANGGARAN	REALISASI	% REAL ANGG.
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	190.525.000	190.065.900	99,76
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Total Belanja Kotor	190.525.000	190.065.900	99,76
Pengembalian	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>190.525.000</b>	<b>190.065.900</b>	<b>99,76</b>

Dibandingkan dengan TA 2019, Realisasi Belanja TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 84,91% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

- Kegiatan bimbingan teknis kepaniteraan yang diikuti dengan meningkatnya belanja barang untuk mendukung kegiatan tersebut.
- Kegiatan Surveilans Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Kelas IB dan II.

Perbandingan Realisasi Belanja per TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI TA 2020	REALISASI TA 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	190.065.900	102.787.300	84,91
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>190.065.900</b>	<b>102.787.300</b>	<b>84,91</b>

*Belanja  
Pegawai Rp0*

### B.3. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2020 tidak mengalami kenaikan dibandingkan dengan TA 2019. Hal ini disebabkan karena pada DIPA ini mempunyai prioritas dalam program peningkatan manajemen peradilan umum dan tidak terdapat anggaran belanja pegawai.

*Belanja  
Barang  
Rp190.065.900*

### B.4. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp190.065.900 dan Rp102.787.300. Realisasi Belanja Barang TA 2020 mengalami kenaikan 84,91% dari Realisasi Belanja Barang TA 2019. Hal ini antara lain disebabkan oleh meningkatnya belanja perjalanan dinas dan belanja barang dan jasa serta adanya penambahan akun belanja barang non operasional khusus penanganan pandemic COVID-19. Dalam penanganan pandemi COVID-19, Pengadilan Tinggi Yogyakarta menggunakan akun khusus. Akun tersebut merupakan jenis akun belanja Barang Non Operasional – Penanganan Pandemi COVID-19 (521241) dengan total nilai realisasi sebesar Rp2.750.000.

*Perbandingan Belanja Barang TA 2020 dan 2019*

URAIAN	REALISASI TA 2020	REALISASI TA 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	13.895.100	18.010.000	(22,85)
Belanja Barang Non Operasional - Belanja Bahan	34.566.400	21.627.000	59,83
Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	2.750.000	-	-
Belanja Persediaan	36.649.400	36.560.200	0,24
Belanja Jasa	5.400.000	-	-
Belanja Pemeliharaan	-	-	-
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	96.805.000	26.590.000	264,07
Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	190.065.900	102.787.200	84,91
Pengembalian Belanja	0	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>190.065.900</b>	<b>102.787.200</b>	<b>84,91</b>

*Belanja Modal  
Rp0*

### B.5. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2020 tidak mengalami perubahan dibandingkan TA 2019. Hal ini disebabkan karena pada DIPA ini mempunyai prioritas dalam program peningkatan manajemen peradilan umum dan tidak terdapat anggaran belanja modal.

*Belanja  
Bantuan Sosial  
Rp0*

### **B.6. Belanja Bantuan Sosial**

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/ barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Realisasi pada TA 2020 tidak mengalami kenaikan dibandingkan TA 2019 karena pada TA 2020 tidak ada pagu anggaran untuk belanja bantuan social.

## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di  
Bendahara  
Pengeluaran  
Rp0*

### C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke kas negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

**Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2020 dan 2019**

URAIAN	TH 2020	TH 2019
Uang Tunai	-	-
Bank BNI No. Acc 1059968067	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*Kas di  
Bendahara  
Penerimaan  
Rp0*

### C.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp0 . Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

**Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA 2020 dan 2019**

URAIAN	TH 2020	TH 2019
Uang Tunai	-	-
Uang di Rekening Bank	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*Kas Lainnya  
dan Setara Kas  
Rp0*

### C.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/ TUP kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2020 dan 2019

URAIAN	TH 2020	TH 2019
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya di KL dari Hibah yang belum Disahkan	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Piutang PNPB  
Rp0

#### C.4. Piutang PNPB

Saldo Piutang PNPB per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang PNPB merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum di selesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNPB disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang PNPB TA 2020 dan 2019

URAIAN	TH 2020	TH 2019
Piutang PNPB	-	-
Piutang Lainnya	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Bagian Lancar  
Tagihan  
TP/TGR Rp0

#### C.5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/ TGR adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR TA 2020 dan 2019

NO	NAMA	TH 2020	TH 2019
1	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

Bagian Lancar  
TPA Rp0

#### C.6. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TPA TA 2020 dan 2019

NO	NAMA	TH 2020	TH 2019
1	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

*Penyisihan  
Piutang Tak  
Tertagih -  
Piutang  
Lancar Rp0*

### C.7. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang TakTertagih - Piutang Lancar per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp0 dan Rp0 . Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar adalah merupakan estimasi at as ketidaktertagihan piutang lancer yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang TakTertagih – Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih TA 2020 dan 2019

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
<b>Piutang Bukan Pajak</b>			
Lancar	-	0,5	-
Kurang Lancar	-	10	-
Diragukan	-	50	-
Macet	-	100	-
<b>Jumlah</b>	-		-
<b>Bagian Lancar TP/TGR</b>			
Lancar	-	0,5	-
Kurang Lancar	-	10	-
Diragukan	-	50	-
Macet	-	100	-
<b>Jumlah</b>	-		-
<b>Bagian Lancar TPA</b>			
Lancar	-	0,5	-
Kurang Lancar	-	10	-
Diragukan	-	50	-
Macet	-	100	-
<b>Jumlah</b>	-		-
<b>Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih</b>	-		-

*Belanja  
Dibayar  
Dimuka Rp0*

### C.8. Belanja Dibayar Dimuka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 . Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/ jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar di Muka TA 2020 dan 2019

JENIS	TH 2020	TH 2019
-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

*Pendapatan  
yang masih  
harus Dibayar  
Rp0*

### C.9. Pendapatan yang masih harus Dibayar

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum di serahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

Rincian Pendapatan yang Masih harus Dibayar TA 2020 dan 2019

JENIS	TH 2020	TH 2019
-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*Persediaan  
Rp52.795.792*

### C.10. Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp52.795.792 dan Rp0 . Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2020 dan 2019

JENIS	TH 2020	TH 2019
Barang Konsumsi	52.795.792	54.762.465
Barang untuk Pemeliharaan	-	4.600
Suku Cadang	-	-
Barang Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>52.795.792</b>	<b>54.762.465</b>

*Tagihan  
TP/TGR Rp0*

### C.11. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/ TGR) per tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TP/TGR TA 2020 dan 2019

NO	DEBITUR	TH 2020	TH 2019
1	-	-	-
Jumlah		-	-

Tagihan  
Penjualan  
Angsuran Rp0

### C.12. Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan Penjualan Angsuran TA 2020 dan 2019

NO	DEBITUR	TH 2020	TH 2019
1	-	-	-
Jumlah		-	-

Penyisihan  
Piutang Tak  
Tertagih -  
Piutang  
Jangka  
Panjang Rp0

### C.13. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/ TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang TA 2020 dan 2019

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
<b>Tagihan TP/TGR</b>			
Lancar	-	0,5	-
Kurang Lancar	-	10	-
Diragukan	-	50	-
Macet	-	100	-
<b>Jumlah</b>	-		-
<b>Tagihan PA</b>			
Lancar	-	0,5	-
Kurang Lancar	-	10	-
Diragukan	-	50	-
Macet	-	100	-
<b>Jumlah</b>	-		-
<b>Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih</b>	-		-

Tanah Rp0

### C.14. Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Pengadilan Tinggi Yogyakarta per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019</b>	-
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	
Revaluasi aset	-
Penyatuan pengadilan	-
<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020</b>	-

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

#### Rincian Tagihan TP/TGR TA 2020 dan 2019

NO	LUAS	LOKASI	NILAI
1	-	-	-
<b>Jumlah</b>		-	-

Peralatan dan  
Mesin Rp0

### C.15. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp0 dan Rp0. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019</b>	<b>0</b>
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Hibah Langsung	0
Transfer masuk	0
Koreksi tambah	0
Mutasi kurang:	
Penghentian dari penggunaan	0
<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>	<b>0</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	0
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2020</b>	<b>0</b>

Rincian aset tetap peralatan dan mesin disajikan dalam Lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung dan  
Bangunan Rp0

### C.16. Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019</b>	-
Mutasi tambah:	
Pembangunan tambahan	-
Mutasi kurang:	-
<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	-
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2020</b>	-

Rincian asset tetap gedung dan bangunan disajikan dalam Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Jalan, Irigasi  
dan Jaringan  
Rp0*

### C.17. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai jalan, irigasi, dan jaringan per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap jalan, irigasi, dan jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019</b>	-
Mutasi tambah:	
Penambahan jaringan teknologi informasi	-
Mutasi kurang:	-
<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	-
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2020</b>	-

Rincian asset tetap jalan, irigasi, dan jaringan disajikan dalam Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Aset Tetap  
Lainnya Rp0*

### C.18. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2020 adalah Rp0 dan Rp0. Aset tetap tersebut berupa barang bercorak kesenian. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk Tahun 2020, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019</b>	-
Mutasi tambah:	
-	-
Mutasi kurang:	
-	-
<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	-
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2020</b>	-

Rincian asset tetap lainnya disajikan dalam Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Konstruksi  
Dalam  
Pengerjaan  
Rp0*

### C.19. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp0 dan Rp0.

*Akumulasi  
Penyusutan  
Aset Tetap Rp0*

## C.20. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

**Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2020 dan 2019**

NO	ASET TETAP	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	Peralatan dan Mesin	-	-	-
2	Gedung dan Bangunan	-	-	-
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
4	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Asset Tak  
Berwujud Rp0*

## C.21. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp0 dan Rp0.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019</b>	-
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>	<b>-</b>
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2020	-
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2020</b>	<b>-</b>

*Aset Lain-lain  
Rp0*

## C.22. Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019</b>	-
Mutasi tambah:	
- Reklasifikasi dari aset tetap	-
Mutasi kurang:	
- penggunaan kembali BMN yang diberhentikan	-
- penghapusan BMN	-
<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	-
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2020</b>	-

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji dalam Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi  
Penyusutan  
dan  
Amortisasi  
Aset Lainnya  
Rp0*

### C.23. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya TA 2020 dan 2019

ASET LAINNYA	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI AMORTISASI	NILAI BUKU
Aset Tak Berwujud	-	-	-
Software	-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-	-
Aset Lain-lain	-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-	-

*Uang Muka  
dari KPPN Rp0*

### C.24. Uang Muka KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang dari  
Pihak Ketiga  
Rp0*

### C.25. Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian

Utang Pihak Ketiga pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
-	-	-
<b>Total</b>	<b>-</b>	

*Pendapatan  
Diterima  
Dimuka Rp0*

### C.26. Pendapatan Diterima Dimuka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/ jasa belum diserahkan. Adapun rincian Pendapatan Diterima Dimuka pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

URAIAN	JUMLAH
-	-
<b>Total</b>	<b>-</b>

*Beban yang  
Masih Harus  
Dibayar Rp0*

### C.27. Beban yang masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan lrewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar TA 2020 dan 2019

URAIAN	TH 2020	TH 2019
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*Ekuitas  
Rp52.795.795*

### C.28. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp52.795.792 dan Rp54.767.065. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

*Pendapatan  
PNBP  
Rp3.250.001*

### D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp3.250.001 dan Rp2.785.000. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2020 dan 2019

URAIAN	TH 2020	TH 2019	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	-	-	-
Pendapatan Lain-lain	3.500.001	2.785.000	25,67
<b>Jumlah</b>	<b>3.500.001</b>	<b>2.785.000</b>	<b>25,67</b>

Pendapatan lain-lain merupakan pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya yang berasal dari transaksi tahun 2020.

*Beban  
Pegawai Rp0*

### D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai TA 2020 dan 2019

URAIAN	TH 2020	TH 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	-	-	-
Beban Tunjangan-tunjangan	-	-	-
Beban Honorarium dan vakasi	-	-	-
Beban Lembur	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*Beban  
Persediaan  
Rp45.928.010*

### D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp45.928.010 dan Rp44.361.408. Beban Persediaan merupakan beban untuk Beban Barang dan Jasa mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2020 dan 2019

URAIAN	TH 2020	TH 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	45.928.010	44.361.408	3,53
Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	-	-	-
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>45.928.010</b>	<b>44.361.408</b>	<b>3,53</b>

*Beban Barang  
Jasa  
Rp56.611.500*

#### D.4. Beban Barang Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp56.611.500 dan Rp39.637.100. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Kenaikan Beban Barang dan Jasa terjadi karena adanya kegiatan bimbingan teknis kepaniteraan pada bulan Juli 2020. Dalam hal penanganan penyebaran COVID-19 telah terealisasi sebesar Rp2.750.000 pada TA 2020. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2020 dan 2019

URAIAN	TH 2020	TH 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	13.895.100	18.010.100	(22,85)
Beban Bahan	34.566.400	21.627.000	59,83
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19	2.750.000	-	-
Beban Jasa Profesi	5.400.000	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>56.611.500</b>	<b>39.637.100</b>	<b>42,82</b>

*Beban  
Pemeliharaan  
Rp4.600*

#### D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing Rp4.600 dan Rp78.200. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Penurunan beban pemeliharaan karena adanya penurunan pada beban persediaan untuk pemeliharaan. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2020 dan 2019

URAIAN	TH 2020	TH 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	4.600	78.200	(94,12)
<b>Jumlah</b>	<b>4.600</b>	<b>78.200</b>	<b>(94,12)</b>

*Beban  
Perjalanan  
Dinas  
Rp96.805.000*

### D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp96.805.000 dan Rp26.590.000. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk Beban Barang untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi yang meningkat menjelang akhir tahun. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalana Dinas TA 2020 dan 2019

URAIAN	TH 2020	TH 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	34.125.000	24.400.000	39,86
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	850.000	2.190.000	(61,19)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	61.830.000	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>96.805.000</b>	<b>26.590.000</b>	<b>264,07</b>

*Beban Barang  
Untuk  
Diserahkan  
Kepada  
Masyarakat  
Rp0*

### D.7. Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA 2020 dan 2019

URAIAN	TH 2020	TH 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-	-
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*Beban  
Bantuan Sosial  
Rp0*

## D.8. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2020 dan 2019 adalah Rp0 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko social dan bersifat selektif. Penurunan beban bansos karena adanya penghematan alokasi anggaran. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2020 dan 2019

URAIAN	TH 2020	TH 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	-	-	-
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	-	-	-
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*Beban  
Penyusutan dan  
Amortisasi  
Rp0*

## D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud. Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak memiliki aset tetap maupun aset tak berwujud sehingga tidak ada catatan terkait nilai beban penyusutan dan amortisasi. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2020 dan 2019

URAIAN	TH 2020	TH 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peratalan dan Mesin	-	-	-
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	-	-
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	-	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
<b>Jumlah Penyusutan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Beban Amortisasi Software	-	-	-
Beban Penyusutan Aset Lan-lain	-	-	-
<b>Jumlah Amortisasi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*Beban  
Penyisihan  
Piutang Tak  
Tertagih Rp0*

## D.10. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagih dan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih TA 2020 dan 2019**

URAIAN	TH 2020	TH 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Lancar	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Non Lancar	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*Surplus dari  
Kegiatan Non  
Operasional  
Rp65.600*

## D.11. Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

**Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2020 dan 2019**

URAIAN	TH 2020	TH 2019	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	146.300	48.800	199,79
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	80.700	63.700	26,68
<b>Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b>65.600</b>	<b>(14.900)</b>	<b>(540,26)</b>

*\*) Pendapatan/ Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO).*

*Pos Luar Biasa  
Rp0*

## D.12. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

**Rincian Pos Luar Biasa TA 2020 dan 2019**

URAIAN	TH 2020	TH 2019	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNPB	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas	-	-	-
Beban Persediaan	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal*  
*Rp54.767.065*

### E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp54.767.065 dan Rp65.757.290.

*Defisit LO*  
*Rp196.033.509*

### E.2. Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp196.033.509 dan Rp107.896.608. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/deficit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

### E.3. Koreksi Ekuitas

*Penyesuaian*  
*Nilai Aset Rp0*

#### E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai*  
*Persediaan*  
*Rp0*

#### E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

URAIAN	KOREKSI
Barang Konsumsi	-
Bahan untuk Pemeliharaan	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

*Selisih*  
*Revaluasi Aset*  
*Tetap Rp0*

#### E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Koreksi Nilai  
Aset Tetap Non  
Revaluasi Rp0*

### E.3.4 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

*Koreksi Lain-  
lain Rp0*

### E.3.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp0 dan Rp0 . Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

*Transaksi  
Antar Entitas  
Rp194.062.236*

### E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp194.062.236 dan Rp96.906.383. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

**Rincian Transaksi Antar Entitas**

TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	NILAI
Ditagihkan ke Entitas Lain	190.065.900
Ditagihkan dari Entitas Lain	(3.250.001)
Transfer Keluar	(42.294.505)
Transfer Masuk	49.540.842
<b>Jumlah</b>	<b>194.062.236</b>

#### E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/ Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN).

Pada

periode hingga 31 Desember 2020, DDEL sebesar Rp190.065.900 sedangkan DKEL sebesar Rp3.250.001.

#### E.4.2 Transfer Masuk/Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/ kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp49.540.842 terdiri dari:

**Rincian Transfer Masuk**

JENIS	ENTITAS ASAL	NILAI
Persediaan	Ditjen Badan Peradilan Umum	49.540.842
Jumlah		49.540.842

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp42.294.505 terdiri dari:

**Rincian Transfer Keluar**

JENIS	ENTITAS TUJUAN	NILAI
Persediaan	Pengadilan Negeri Yogyakarta	13.183.665
Persediaan	Pengadilan Negeri Sleman	8.073.725
Persediaan	Pengadilan Negeri Bantul	7.152.860
Persediaan	Pengadilan Negeri Wates	7.358.010
Persediaan	Pengadilan Negeri Wonosari	6.526.245
Jumlah		42.294.505

### **E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung**

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp0.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 adalah Rp0.

*Entitas Akhir  
Rp52.795.792*

### **E.5. Entitas Akhir**

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp52.795.792 dan Rp54.767.065.

## F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

### F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan.

### F.2. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK

Tidak terdapat temuan BPK terhadap Laporan Keuangan semester lalu maupun pada Laporan Keuangan tahun lalu.

### F.3. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua

Tidak ada pendapatan dan belanja akrual per 31 Desember 2020

### F.4. Pengungkapan Lainnya

#### F.4.1 Laporan Capaian Output

Dalam kerangka penganggaran berbasis kinerja, capaian output merupakan salah satu ukuran untuk menilai bagaimana setiap anggaran yang dikelola dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, sebagai bentuk dari transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, dibutuhkan data dan informasi yang reliabel untuk mengukur perkembangan output belanja yang dikelola oleh Satker K/L sehingga dapat diketahui sejauh mana program dan kegiatan pemerintah telah mencapai sasaran yang ditetapkan. Hal tersebut penting untuk menentukan langkah antisipatif apa yang perlu dilakukan agar setiap target output dapat tercapai pada akhir periode, serta sebagai langkah evaluasi untuk merumuskan kebijakan di masa mendatang.

Laporan Capaian Output

Uraian Output	Belanja			Keluaran				Ket
	Belanja	Realisasi	%	Rencana	Real/vol	Satuan	%	
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum								
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum								
Layanan Dukungan Penyelesaian Perkara	118.720.000	118.655.300	99,95	1	1	Satker	100	Semua kegiatan dan realisasi anggaran terlaksana
Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat Pertama dan Banding yang Tepat Waktu	71.805.000	71.410.600	99,45	160	160	Perkara	100	Semua kegiatan dan realisasi anggaran terlaksana

#### F.4.2 Pejabat Perbendaharaan

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 12/PA/SK/II/2020 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengakibatkan penggantian Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada tanggal 03 Februari 2020:

Jabatan	Semula	Menjadi
Kuasa Pengguna Anggaran	Sagimin, S.H., M.M.	Tavip Kuntari Astuti, S.IP., S.H

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 547/SEK/Kp.I/SK/VIII/2020 tentang Promosi dan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Dibawahnya pada tanggal 07 Agustus 2020:

Jabatan	Semula	Menjadi
Kuasa Pengguna Anggaran	Tavip Kuntari Astuti, S.IP., S.H	Drs. Muhidin, M.H.

### F.4.3 Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta adalah:

- a. Berdasarkan Persetujuan Kepala KPPN Yogyakarta Nomor 100012/030 Perihal Persetujuan Pembukaan Rekening Pengeluaran atas nama Pengadilan Tinggi Yogyakarta, maka dilakukan penggantian rekening tabungan uang persediaan sebagai berikut:

Uraian	Semula	Menjadi
Rekening Bendahara Pengeluaran	Bank BRI No. Rek 0245-01-000838-30-0	Bank BNI No. Rek 1059968067

Rekening Bendahara Pengeluaran tercatat pada Bank BNI dengan No. Rekening 1059968067 Atas Nama BPG 030 PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA. Surat ijin penggunaan rekening ini diterbitkan oleh Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Yogyakarta No. 100012/030 tanggal 4 September 2020. Rekening ini digunakan untuk menampung dana belanja satuan kerja yang tertuang pada DIPA BADILUM. Saldo akhir per 31 Desember 2020 adalah Rp0 (*nol rupiah*).

- b. Berdasarkan Persetujuan Kepala KPPN Yogyakarta Nomor 100011/030 Perihal Persetujuan Pembukaan Rekening Lainnya atas nama Pengadilan Tinggi Yogyakarta, maka dilakukan penggantian rekening tabungan biaya perkara sebagai berikut:

Uraian	Semula	Menjadi
Rekening Lainnya	Bank BRI No. Rek 00002164-01-000070-30-8	Bank BNI No. Rek 1059978075

Rekening Bendahara Pengeluaran tercatat pada Bank BNI dengan Nomor Rekening 1059978075, atas nama RPL 030 PDT PT YOGYAKARTA UTK BIAYA PERKARA. Surat ijin penggunaan rekening ini diterbitkan oleh oleh Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Yogyakarta dengan surat No. 100011/030 tanggal 4 September 2020. Rekening ini digunakan untuk menampung dana biaya perkara tingkat banding di Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Saldo akhir per 31 Desember 2020 adalah Rp4.662.488.

#### **F.4.4 Pengelolaan Uang Titipan Pihak Ketiga**

Biaya perkara/Biaya Proses merupakan biaya penyelesaian proses perkara dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012, biaya proses penyelesaian perkara dipergunakan untuk penyelesaian proses perkara perdata, perkara tata usaha negara dan hak uji materil pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Semua biaya proses perkara dibebankan kepada *pihak*, jadi *para pihak* terlebih dahulu harus membayar ketika akan berperkara di Pengadilan. Karena biaya perkara bukan merupakan keuangan negara melainkan uang titipan pihak ke-3 (pihak yang berperkara) maka biaya perkara ini tidak dimasukkan dalam Neraca melainkan dicantumkan atau diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012.

Pada Pengadilan Tingkat Banding seperti Pengadilan Tinggi Yogyakarta, biaya perkara ini tidak diterima langsung dari pihak yang berperkara tetapi diterima melalui Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri). Selain itu, pada Pengadilan Tingkat Banding tidak terdapat Biaya Eksekusi dan Biaya Konsignasi. Biaya Eksekusi dan Biaya Konsignasi hanya ada di Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri). Biaya Perkara/Biaya Proses ini tidak dikelola oleh Bendahara Penerimaan maupun Bendahara Pengeluaran, melainkan dikelola oleh Bendahara tersendiri yaitu Bendahara Pengelola Biaya Proses. Berikut adalah rincian keuangan perkara pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta:

**RINCIAN BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA  
DAN UANG TITIPAN PIHAK KETIGA LAINNYA  
TAHUN 2020**

Satuan Kerja : Pengadilan Tinggi Yogyakarta

No.	Uraian	Keadaan Keuangan				Keterangan
		Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir	
1	Saldo Awal	432.000				
2	Penerimaan		19.500.000			
3	Biaya Materai			798.000		
4	Biaya Redaksi			1.330.000		
5	Biaya Proses/ATK			17.420.000		
6	Biaya Lain-lain			-		
7	Saldo Akhir				384.000	
	<b>Jumlah</b>	<b>432.000</b>	<b>19.500.000</b>	<b>19.548.000</b>	<b>384.000</b>	

**REKAPITULASI BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA  
DAN UANG TITIPAN PIHAK KETIGA LAINNYA  
TAHUN 2020**

Satuan Kerja : Pengadilan Tinggi Yogyakarta

No.	Uraian	Keadaan Keuangan					
		Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir	Kas di Bank	Kas di Brankas
1	Biaya Perkara	432.000	19.500.000	19.548.000	384.000	4.662.488	299.550
2	Biaya Eksekusi	-	-	-	-	-	-
3	Biaya Konsinyasi	-	-	-	-	-	-
4	Uang Titipan Perkara Pidana*)	-	-	-	-	-	-
5	PHI*)	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>432.000</b>	<b>19.500.000</b>	<b>19.548.000</b>	<b>384.000</b>	<b>4.662.488</b>	<b>299.550</b>

\*) Khusus Pengadilan Negeri

### F.4.5 Revisi DIPA

Selama TA 2020, Pengadilan Tinggi Yogyakarta melakukan beberapa revisi yaitu sebagai berikut:

1. Revisi DIPA Ke - 1 DIPA 03 (Badilum) Satker Pengadilan Tinggi Yogyakarta (400343) tanggal 24 Januari 2020:
  - a. Pemuktakhiran data POK
  - b. Perubahan Pejabat Perbendaharaan

2. Revisi DIPA Ke - 2 DIPA 03 (Badilum) Satker Pengadilan Tinggi Yogyakarta (400343) tanggal 20 April 2020:
  - a. Pemutakhiran data POK
  - b. Penyesuaian rencana penarikan halaman III DIPA dengan realisasi dan rencana berikutnya
  - c. Perubahan Pejabat Perbendaharaan
3. Revisi DIPA Ke - 3 DIPA 03 (Badilum) Satker Pengadilan Tinggi Yogyakarta (400343) tanggal 21 Juli 2020:
  - a. Pemutakhiran data POK
  - b. Penyesuaian rencana penarikan halaman III DIPA dengan realisasi dan rencana berikutnya
4. Revisi DIPA Ke - 4 DIPA 03 (Badilum) Satker Pengadilan Tinggi Yogyakarta (400343) tanggal 16 September 2020:
  - a. Pemutakhiran data POK
  - b. Penyesuaian rencana penarikan halaman III DIPA dengan realisasi dan rencana berikutnya
5. Revisi DIPA Ke - 5 DIPA 03 (Badilum) Satker Pengadilan Tinggi Yogyakarta (400343) tanggal 26 Oktober 2020:
  - a. Pemutakhiran data POK
  - b. Penyesuaian rencana penarikan halaman III DIPA dengan realisasi dan rencana berikutnya
  - c. Perubahan Pejabat Perbendaharaan
6. Revisi DIPA Ke - 6 DIPA 03 (Badilum) Satker Pengadilan Tinggi Yogyakarta (400343) tanggal 22 Desember 2020:
  - a. Pemutakhiran data POK
  - b. Penyesuaian rencana penarikan halaman III DIPA dengan realisasi dan rencana berikutnya

#### F.4.6 Ralat SPM

Koreksi data SPM pada SPM No. 0017T/400343/2020 tanggal 29 Juli 2020 yang telah diterbitkan SP2D dengan No. 200301701000624 tanggal 30 Juli 2020 dikarenakan kesalahan pembebanan akun senilai Rp2.750.000 sebagai berikut:

URAIAN	SEMULA		MENJADI	
	AKUN	URAIAN	AKUN	URAIAN
Perubahan Akun	521131	Barang Belanja Operasional Penanganan COVID-19 - Pandemi	521241	Barang Belanja Non Operasional Penanganan Pandemi COVID-19 - Pandemi

#### F.4.7 Catatan Penting Lainnya

Pada awal triwulan pertama tahun 2020, telah terjadi pandemi COVID-19 yang tidak dapat dipungkiri bahwa situasi ini berpengaruh terhadap pelayanan Pengadilan Tinggi Yogyakarta terhadap *stakeholder*. Dalam rangka memberikan pelayanan terbaik maka Pengadilan Tinggi Yogyakarta selalu memastikan bahwa penerapan protokol kesehatan telah dilaksanakan dengan ketat dan konsisten oleh seluruh pegawai dalam memberikan pelayanan. Disamping itu, Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah membentuk Satgas COVID-19 dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencegahan Penyebaran COVID-19 sebagai upaya pengendalian terhadap penyebaran COVID-19.

# *DATA PENDUKUNG*

*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,  
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN  
NILAI BUKU ASET TETAP*

**Pengadilan Tinggi Yogyakarta**  
**Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap**  
**untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2020**

No.	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
A.	Peralatan dan Mesin	-	-	-	-
B.	Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
C.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-
D.	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
E.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan	-	-	-	-
	<b>Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap</b>		-	-	-
	<b>Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya</b>		-	-	-

*B. INFORMASI PENDAPATAN  
DAN BELANJA SECARA  
AKRUAL*

**INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL  
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2020**

BA/UAPA : (005) Mahkamah Agung  
 ES1/UAPPA ES1 : (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum  
 UAKPA : (400343) Pengadilan Tinggi Yogyakarta

No	Pendapatan/Belanja		Realisasi Menurut Basis Kas	Penyesuaian AkruaI		Realisasi Menurut Basis AkruaI	Dokumen Sumber
	Kode Akun	Uraian		Tambah	Kurang		
-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah			-	-	-	-	

## *C. INFORMASI HIBAH*

**DAFTAR HIBAH LANGSUNG BERUPA UANG/BARANG/JASA  
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 30 Juni 2020**

BA/UAPA : (005) Mahkamah Agung  
 ES1/UAPPA ES1 : (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum  
 UAKPA : (400343) Pengadilan Tinggi Yogyakarta

No	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Penyesuaian Akrual	
						Tambah	Kurang
-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah						-	-

## *D. DATA PENDUKUNG LAPORAN KEUANGAN LAINNYA*

Dd1



005  
03  
0400  
400343

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN TINGGI

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI

{halaman ini untuk cover di samping/punggung saat dijilid}

